



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Jl. Tulip No. 09 Way Mengaku, Liwa  
Telepon (0728) 21106, 21117 Faks. (0728) 21106

**BERITA ACARA**  
**HASIL PENYELARASAN RENSTRA DAN IKU TERHADAP**  
**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**Nomor : 900/ 108-a /BA/IV.01/2021**

Pada hari ini Senin, Tanggal Satu Bulan Maret Tahun 2021, kami Tim Reviu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 900/36.a/KPTS/IV.01/2017 Tanggal 17 April 2017, telah melaksanakan Reviu Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan rincian hasil sebagai berikut :

**I. VISI**

**a. Uraian Visi**

<b>VISI</b>
Terwujudnya Kabupaten Lampung Barat Hebat dan Sejahtera.

**b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Visi**

BPKD fokus untuk membantu mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat di bidang pengelolaan keuangan daerah, dengan mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra BPKD 2017-2022.

**c. Uraian Visi Sebelum dan Setelah Reviu**

<b>VISI</b>
Terwujudnya Kabupaten Lampung Barat Hebat dan Sejahtera.

## II. MISI

### a. Uraian Misi Sebelum Reviu

VISI	MISI
Terwujudnya Kabupaten Lampung Barat Hebat dan Sejahtera.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik.

### b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Misi

BPKD fokus untuk membantu mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat di bidang pengelolaan keuangan daerah, dengan mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra BPKD 2017-2022.

### c. Uraian Misi Sebelum dan Setelah Reviu

VISI	MISI
Terwujudnya Kabupaten Lampung Barat Hebat dan Sejahtera.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik.

## III. TUJUAN

### a. Uraian Tujuan Sebelum Reviu

MISI	TUJUAN
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik.	Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

### b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Tujuan

BPKD fokus untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra BPKD 2017-2022, yaitu Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Predikat Opini WTP.

**c. Uraian Tujuan Sebelum dan Setelah Reviu**

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik.	Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

**IV. SASARAN**

**a. Uraian Sasaran Sebelum Reviu**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.

**b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Sasaran**

BPKD fokus untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra BPKD 2017-2022, dalam pengelolaan keuangan daerah dengan target WTP, pengelolaan barang milik daerah yang sesuai peraturan perundangan, dan peningkatan Pendapatan Daerah dan PAD.

**c. Uraian Sasaran Sebelum dan Setelah Reviu**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.

**V. INDIKATOR KINERJA SASARAN**

**a. Uraian Indikator Kinerja Sasaran Sebelum Reviu**

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
	2. Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017.
	3. Persentase peningkatan Pendapatan Daerah.
	4. Persentase peningkatan PAD.



## b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Indikator Kinerja

Pada Cascading Kinerja berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Indikator Kinerja Persentase peningkatan Pendapatan Daerah dan Persentase peningkatan PAD, didukung oleh 1 (satu) Program, yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Hal ini tidak tepat, karena 1 (satu) Program tidak dapat mendukung pencapaian lebih dari 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran. Karena nomenklatur dan jumlah Program telah ditentukan di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, dimana tidak dimungkinkan menambah nomenklatur dan jumlah Program, maka direkomendasikan untuk mengurangi/menghapus Indikator Kinerja Sasaran.

Mengingat selama beberapa tahun terakhir capaian Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah tidak pernah mencapai target kinerja, bahkan mencapai minus, yang diakibatkan oleh faktor eksternal di luar kendali Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, salah satunya akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan Pemerintah Pusat mengambil kebijakan Refocussing Anggaran, salah satunya dengan mengurangi pagu DAU untuk Provinsi/Kabupaten yang menjadi salah satu komponen yang signifikan di dalam pos Pendapatan Daerah, maka Indikator Kinerja tersebut yang direkomendasikan untuk dihapus.

## c. Uraian Indikator Kinerja Sasaran Setelah Reviu

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
	2. Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017.
	3. Persentase peningkatan PAD.

## VI. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

### a. Uraian IKU Sebelum Reviu

SASARAN	IKU
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
	2. Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017.
	3. Persentase peningkatan Pendapatan Daerah.
	4. Persentase peningkatan PAD.

### b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang IKU

Karena Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah telah dihapus dari Indikator Kinerja Sasaran, maka tidak lagi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).

**c. Uraian IKU Sebelum dan Setelah Reviu**

IKU (sebelum reviu)	IKU (setelah reviu)
1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017.	2. Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017.
3. Persentase peningkatan Pendapatan Daerah.	3. Persentase peningkatan PAD.
4. Persentase peningkatan PAD.	

**VII. TARGET KINERJA**

**a. Rincian Target Indikator Kinerja (IKS/IKU) Sebelum Reviu**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2017)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2022)
			2018	2019	2020	2021	2022	
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Predikat Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2. Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017.	%	100	100	100	100	100	100	100
3. Persentase peningkatan Pendapatan Daerah.	%	53,01	3	3	3	3	3	15
4. Persentase peningkatan PAD.	%	153,95	3	3	3	3	3	15

**b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Target Kinerja Sasaran**

Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah dihapus dari Indikator Kinerja Sasaran dan IKU, demikian pula dengan target Indikator Kinerja ini pun tidak ada lagi.

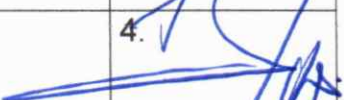
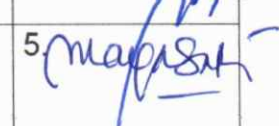
**c. Rincian Target Indikator Kinerja (IKS/IKU) Setelah Reviu**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2017)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2022)
			2018	2019	2020	2021	2022	
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Predikat Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2. Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017.	%	100	100	100	100	100	100	100
3. Persentase peningkatan PAD.	%	153,95	3	3	3	3	3	15



Berdasarkan hasil penyelarasan tersebut di atas, maka **Tabel Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022**, adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2017)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2022)
						2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Predikat Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			2. Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017.	%	100	100	100	100	100	100	
			3. Persentase peningkatan PAD.	%	153,95	3	3	3	3	3	15

<p>Mengetahui :</p> <p><b>KEPALA BPKD KABUPATEN LAMPUNG BARAT,</b></p>  <p><b>Ir. OKMAL M.Si.</b> PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19641005 199403 1 003</p>	<p>Liwa, 1 Maret 2021</p> <p>Tim Reviu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat :</p>		
	1. Ketua Tim	Irvan Leonardo A., S.P., M.Si.	1. 
	2. Anggota	Timbul Situmeang, S.E.	2. 
	3. Anggota	Burhanuddin, S.IP	3. 
	4. Anggota	Sumadi, S.IP	4. 
	5. Anggota	Mayasari, S.E.	5. 
	6. Narasumber	Tim SAKIP Kabupaten Lampung Barat	6. 